

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Negara-negara berkembang mempunyai tujuan pembangunan ekonomi untuk mencapai kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat, meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, meningkatkan penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan struktur perekonomian yang seimbang (Basuki, 2014).

Sumber daya manusia sebagai salah satu pelaku pembangunan untuk membangun ekonomi. Allah SWT menciptakan manusia dengan maksud agar memakmurkan bumi, dalam arti manusia memanfaatkan sumber daya alam di bumi dan menjadi tenaga-tenaga yang bertugas mengelola dan memproduksi hasil-hasil bumi sehingga tercapai kesejahteraan hidup. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 61 :

فَأَسْتَعْفِرُوهُ فِيهَا وَاسْتَعْمَرَكُمْ الْأَرْضِ مِنْ شَأْكُمْ

Artinya : Dia telah menciptakan kamu dari bumi (tanah) dan menjadikan kamu pemakmurnya. (Q.S Hud : 61)

Dalam ayat di atas, kata kunci faktor produksi sumber daya manusia terdapat dalam *wasta'marakun* yang berarti kamu memakmurkannya. Disini sebagai khalifah, manusia di harapkan oleh Allah untuk menjadi pemakmur bumi dalam pemanfaatan tanah dan alam.

Keberhasilan pembangunan tidak dijamin oleh penduduk yang besar, bahkan penduduk yang besar dapat menyebabkan beban bagi keberlangsungan pembangunan. Ketersediaan lapangan kerja yang tidak

sebanding dengan jumlah penduduk yang besar menyebabkan tingginya angka pengangguran (Depnakertrans, 2004).

Pembangunan ekonomi dapat ditingkatkan melalui industrialisasi. Proses industrialisasi merupakan proses interaktif antara perkembangan teknologi, inovasi, spesialisasi produksi dan perdagangan antar bangsa yang disertai dengan peningkatan pendapatan per kapita dan menyebabkan perubahan struktur ekonomi. Oleh karena itu, proses industrialisasi dalam suatu perekonomian sering diartikan sebagai proses yang mengubah struktur perekonomian (Tambunan, 2001).

Industrialisasi adalah salah satu sumber pertumbuhan pada perekonomian di suatu daerah. Peran strategis yang industrialisasi berikan yaitu dalam mendukung ekonomi yang cukup besar secara berkelanjutan dan meningkatkan produksi fisik masyarakat dengan perluasan lapangan usaha dan peningkatan lapangan kerja. Industrialisasi dibedakan menjadi industri besar, industri menengah, dan industri kecil serta rumah tangga.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), industri besar adalah perusahaan yang mempekerjakan 100 orang atau lebih, industri menengah adalah perusahaan dengan tenaga kerja 20 hingga 99 orang, industri kecil adalah perusahaan dengan tenaga kerja 5-19 karyawan dan Industri Rumah Tangga adalah perusahaan dengan 1-4 karyawan. Saat ini, sektor industri mungkin merupakan sektor yang dapat memimpin sektor ekonomi lainnya untuk berkembang. Produk industri selalu memiliki basis pertukaran (*business*

terms) yang besar atau lebih menguntungkan dan menciptakan nilai tambah yang besar dibandingkan dengan produk dari sektor lain (Indrianti, 2011).

Industri tidak hanya berkonsentrasi pada industri besar dengan pabrik besar, tetapi juga pada industri kecil dan menengah. industri kecil dan menengah (IKM) memainkan peran kunci dalam menyerap tenaga kerja, sektor ini mampu mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan kerja, selain itu juga menyerap Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar dibanding usaha-usaha besar (Tambunan dalam Budiawan, 2013).

TABEL 1. 1
Tenaga Kerja dan Jumlah Unit Usaha Industri Besar, Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta, 2017-2019.

Industri	Tahun	Unit Usaha	Tenaga Kerja
Industri Besar dan Sedang	2017	532	78.914
	2018	513	74.153
	2019	509	75.129
Rata-Rata		518	76.065
Industri Kecil dan Menengah	2017	91.214	324.667
	2018	94.840	351.425
	2019	97.013	360.254
Rata-Rata		94.356	345.449

Sumber: Disperindag D.I.Yogyakarta (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.1 menunjukkan perbandingan antara penyerapan tenaga kerja dan jumlah unit usaha pada industri kecil dan menengah dan industri besar di Daerah Istimewa Yogyakarta secara keseluruhan. Penyerapan tenaga kerja dan unit usaha pada industri kecil dan menengah mengalami peningkatan setiap tahunnya dengan rata-rata tenaga kerja yang terserap selama tiga tahun adalah 345.449 tenaga kerja dan unit usaha sejumlah 518 unit. Industri besar pada jumlah unit usaha mengalami penurunan pada tahun 2018 dan 2019, sedangkan pada tenaga kerja mengalami penurunan pada

tahun 2018 dengan rata-rata tenaga kerja yang mampu terserap adalah 76.065 tenaga kerja dan 518 unit usaha. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kehadiran industri kecil dan menengah berperan penting dalam perekonomian Daerah Istimewa Yogyakarta dan merupakan salah satu industri yang mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.

Industri kecil dan menengah (IKM) memainkan peran penting dalam perekonomian Indonesia, karena sektor ini dapat mengatasi pengangguran dengan menyediakan lapangan pekerjaan dan mengurangi kemiskinan dengan pemerataan dalam distribusi karena industri kecil menengah menjadi sumber pendapatan primer maupun sekunder bagi banyak masyarakat di Indonesia. Industri kecil dan menengah, sektor tersebut umumnya menggunakan sumber daya lokal, baik manusia, modal, bahan baku, dan peralatan, yang memungkinkannya bertahan dan berkembang di tengah krisis, sehingga tidak mengandalkan bahan impor (Budiawan, 2013).

Secara umum, pertumbuhan usaha industri kecil dan menengah di suatu daerah akan meningkatkan peluang lapangan pekerjaan, dimana permintaan tenaga kerja juga meningkat. Menurut Squire (1992), jumlah unit usaha berpengaruh positif terhadap jumlah karyawan, seiring bertambahnya jumlah unit usaha, demikian pula jumlah karyawan. Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah unit usaha di sektor industri kecil menengah di Provinsi Yogyakarta tahun 2017-2019.

TABEL 1. 2
Jumlah Tenaga Kerja dan Unit Usaha Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Wilayah, 2017-2019.

Kabupaten/Kota	Tahun	Tenaga Kerja	%	Unit Usaha	%
Yogyakarta	2017	24.588		4073	
	2018	72.029	193	14.894	266
	2019	13.953	-81	3.304	-78
Bantul	2017	98.695		21.402	
	2018	94.707	-4	21.822	2
	2019	127.928	35	28.256	29
Sleman	2017	62.876		18.056	
	2018	88.559	41	21.294	18
	2019	86.178	-3	19.726	-7
Kulonprogo	2017	72.449		25.483	
	2018	44.824	-38	16.679	-35
	2019	65.138	45	21.076	26
Gunungkidul	2017	84.059		22.202	
	2018	51.306	-39	20.151	-9
	2019	67.058	31	24.651	22

Sumber: Disperindag D.I.Yogyakarta (data diolah)

Tabel 1.2 menunjukkan pertumbuhan unit usaha dan penyerapan tenaga kerja di Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta cenderung fluktuatif. Tahun 2018 di Kota Yogyakarta terjadi peningkatan unit usaha sebesar 266 persen diikuti dengan penyerapan tenaga kerja sebesar 193 persen, namun pada tahun 2019 unit usaha menurun sebesar 78 persen diikuti dengan penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 81 persen. Begitu pula dengan Kabupaten Kulonprogo dan Gunungkidul yang mengalami penurunan pada unit usaha dan tenaga kerja pada tahun 2018 dan mengalami peningkatan unit usaha serta tenaga kerja pada tahun 2019. Berbeda dengan Kabupaten Sleman yang mengalami peningkatan unit usaha dan tenaga kerja sebesar 18 dan 41 persen pada tahun 2018, namun mengalami penurunan unit usaha dan tenaga kerja pada tahun 2019 sebesar 7 dan 3 persen.

Jumlah unit usaha pada Kabupaten Bantul tahun 2018 mengalami peningkatan sebesar 2 persen, namun tidak diikuti dengan kenaikan tenaga kerja yang justru mengalami penurunan sebesar 8 persen. Menurut Wulandari (2021) dalam penelitiannya, jumlah unit usaha mempunyai pengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah. Laju pertumbuhan tenaga kerja yang tidak diimbangi dengan laju pertumbuhan unit usaha menunjukkan bahwa unit usaha tinggi dalam menyerap tenaga kerja, atau tingkat produktivitas tenaga kerja masih rendah. Tinggi rendahnya jumlah tenaga kerja yang diminta oleh perusahaan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya jumlah barang yang diproduksi oleh tenaga kerja. Semakin tinggi jumlah barang yang diminta oleh konsumen maka semakin tinggi pula tingkat barang yang diproduksi dan hal ini menyebabkan bertambahnya jumlah tenaga kerja yang dibutuhkan oleh perusahaan (Simanjutak, 2001).

Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja dan nilai produksi pada sektor Industri Kecil Menengah di Provinsi Yogyakarta tahun sampai tahun 2017-2019.

TABEL 1.3
Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Produksi Industri Kecil dan Menengah di
Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Wilayah, 2017-2019.

Kabupaten/Kota	Tahun	Tenaga Kerja	%	Nilai Produksi (Rp.000)	%
Yogyakarta	2017	24.588		424.580.204	
	2018	72.029	193	2.255.259.673	431
	2019	13.953	-81	438.879.838	-81
Bantul	2017	98.695		979.636.643	
	2018	94.707	-4	3.754.868.543	283
	2019	127.928	35	4.095.403.310	9
Sleman	2017	62.876		1.787.442.161	
	2018	88.559	41	2.543.272.305	42
	2019	86.178	-3	2.661.321.721	5
Kulonprogo	2017	72.449		475.717.325	
	2018	44.824	-38	2.032.017.805	327
	2019	65.138	45	2.988.476.928	47
Gunungkidul	2017	84.059		211.198.291	
	2018	51.306	-39	2.163.852.199	925
	2019	67.058	31	2.857.915.566	32

Sumber: Disperindag D.I.Yogyakarta (data diolah)

Tabel 1.3 menunjukkan pertumbuhan nilai produksi dan tenaga kerja di Kabupaten/ Kota Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2017-2019. Teori Simanjutak tidak berlaku terhadap kenyataan yang terjadi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Berdasarkan Tabel 1.3 menunjukkan bahwa pada Kabupaten Bantul, Kulonprogo dan Gunungkidul tahun 2018, jumlah tenaga kerja mengalami penurunan sebesar 4, 38, dan 39 persen dari tahun sebelumnya, namun nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 283, 327, dan 925 persen. Begitu pula dengan Kabupaten Sleman yang mengalami penurunan tenaga kerja sebesar 3 persen namun nilai produksi meningkat sebesar 5 persen.

Berbeda dengan Kota Yogyakarta, dimana pada tahun 2018 nilai produksi mengalami peningkatan sebesar 431 persen, diikuti dengan peningkatan jumlah tenaga kerja sebesar 193 persen. Tahun 2019 mengalami penurunan sebesar 81 persen diikuti pula dengan penurunan jumlah tenaga kerja sebesar 81 persen.

Menurut Budiawan (2013) dalam penelitiannya nilai produksi memberikan pengaruh yang positif terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah. Penelitian dengan hasil yang berbeda, ditemukan bahwa nilai produksi memberikan pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja industri kecil (Basuki, 2015). Sektor industri memerlukan adanya investasi yang memadai agar sektor industri dapat berkembang dan berjalan sesuai tujuan. Usaha akumulasi modal dapat dilakukan dengan melalui kegiatan investasi yang dapat menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya meningkatkan permintaan tenaga kerja (Sudarsono, 1998).

Permintaan tenaga kerja dan pendapatan sangat dipengaruhi oleh investasi. Pertumbuhan nilai investasi menentukan pertumbuhan penyerapan tenaga kerja. Tabel 1.4 menunjukkan pertumbuhan tenaga kerja dan jumlah unit usaha di sektor industri kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta tahun sampai tahun 2017-2019.

TABEL 1. 4

Jumlah Tenaga Kerja dan Nilai Investasi Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta Menurut Wilayah, 2017-2019.

Kabupaten/Kota	Tahun	Tenaga Kerja	%	Nilai Investasi (Rp.000)	%
Yogyakarta	2017	24.588		91.335.985	
	2018	72.029	193	488.002.872	434
	2019	13.953	-81	37.795.238	-92
Bantul	2017	98.695		56.589.0881	
	2018	94.707	-4	506.298.756	-11
	2019	127.928	35	852.580.433	68
Sleman	2017	62.876		447.650.678	
	2018	88.559	41	656.143.000	47
	2019	86.178	-3	620.949.023	-5
Kulonprogo	2017	72.449		85.732.023	
	2018	44.824	-38	85.044.350	-1
	2019	65.138	45	226.817.140	167
Gunungkidul	2017	84.059		95.804.711	
	2018	51.306	-39	214.232.296	124
	2019	67.058	31	346.442.017	62

Sumber: Disperindag D.I.Yogyakarta (data diolah)

Berdasarkan Tabel 1.4 nilai investasi industri kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta perwilayah mengalami fluktuasi. Pada tahun 2018 Kota Yogyakarta dan Kabupaten Sleman mengalami kenaikan investasi dan diikuti dengan peningkatan tenaga kerja sebesar 434 persen dan 47 persen diikuti dengan peningkatan tenaga kerja sebesar 193 persen dan 41 persen. Kabupaten Bantul dan Kabupaten Kulonprogo mengalami penurunan investasi dan diikuti penurunan tenaga kerja sebesar 11 persen dan 1 persen diikuti dengan penurunan tenaga kerja sebesar 4 persen dan 38 persen sedangkan Kabupaten Gunungkidul mengalami kenaikan investasi sebesar 124 persen, namun tidak diikuti dengan kenaikan tenaga kerja, tingkat tenaga kerja justru

menurun sebesar 39 persen. Hal tersebut tidak sejalan dengan pendapat Suparmoko (1994), dimana semakin besar nilai investasi maka semakin besar pula tambahan tenaga kerja yang diperlukan. Menurut Putra (2012), nilai investasi berpengaruh positif terhadap penyerapan tenaga kerja di industri. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pertumbuhan penyerapan tenaga kerja di Daerah Istimewa Yogyakarta tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan jumlah unit usaha, nilai investasi dan nilai produksi.

Keterbaruan dalam penelitian ini adalah adanya rentang waktu data yang lebih besar dari penelitian sebelumnya. Jika dibandingkan dengan penelitian - penelitian terdahulu, rentang waktu yang digunakan tidak terlalu jauh. Penelitian ini menggunakan rentang waktu data selama 15 tahun dari 5 Kabupaten/ Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena pada prinsipnya semakin banyak sampel semakin baik pula hasil penelitian (Alwi, 2012).

Berdasarkan kenyataan di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Jumlah Unit usaha, Nilai Produksi, dan Nilai Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil dan Menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta”.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang (Tabel 1.1) dapat dilihat bahwa sektor industri kecil dan menengah (IKM) dapat menyerap tenaga kerja lebih banyak dari industri besar di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun permasalahan yang dihadapi oleh industri kecil dan menengah (IKM) di Kabupaten/Kota Yogyakarta adalah dalam penyerapan tenaga kerja pada kenyataannya

cenderung fluktuatif dan laju pertumbuhan yang tidak sejalan dengan variabel lain. Semakin tinggi jumlah unit usaha, nilai investasi, dan nilai produksi mestinya diikuti pula dengan peningkatan jumlah penyerapan tenaga kerja. Namun penyerapan tenaga kerja pada beberapa Kabupaten tidak selalu sejalan dengan pertumbuhan investasi, nilai produksi dan jumlah unit usaha. Berdasarkan permasalahan tersebut, dapat dirumuskan beberapa masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
2. Bagaimana pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?
3. Bagaimana pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Dari latar belakang yang telah diuraikan di atas maka penelitian dalam menganalisis pengaruh jumlah unit usaha, nilai investasi, dan nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah di Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu sebagai berikut:

1. Menganalisis pengaruh jumlah unit usaha terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
2. Menganalisis pengaruh nilai investasi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Menganalisis pengaruh nilai produksi terhadap penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan menengah (IKM) Kabupaten/Kota di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara aktif berkontribusi dalam penelitian dengan membandingkan teori dan praktek.
2. Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tambahan sumber pembandingan untuk penelitian selanjutnya.
3. Kajian ini diharapkan dapat menjadi tambahan bahan pertimbangan bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam merumuskan kebijakan.